**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dunia kini memasuki era globalisasi, dimana terjadinya transkulturasi dan pengembangan pada berbagai bidang yang memfasilitasi pertukaran budaya yang satu dengan yang lainnya. Globalisasi adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, social dan budaya yang melewati batas-batas internasional[[1]](#footnote-2). Globalisasi terbentuk karena perkembangan komunikasi internasional yang terus maju dan berkembang hingga dimana negara-negara saling bergantung dan menghilangkan batas ruang dan waktu.

Terdapat beberapa aspek dalam globalisasi, yaitu globalisasi informasi dan komunikasi, globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, globalisasi politik dan sebagainya. Globalisasi ekonomi merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara. Globalisasi ekonomi ini cenderung menuju liberalisme ekonomi, yaitu tidak adanya campur tangan pemerintah dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional. Liberalisme ekonomi ini mendorong adanya liberalisasi perdagangan dengan adanya perdagangan bebas, yaitu konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Globalisasi ekonomi ditandai dengan adanya organisasi internasional dalam bidang perdagangan, yaitu *World Trade Organization* (WTO). WTO terbentuk melalui putaran Uruguayyang dilaksanakan oleh *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan. Tujuan penting WTO adalah untuk mendorong arus perdagangan antarnegara dengan mengurangi dan menghapuskan berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa.

Untuk mendorong liberalisasi perdagangan, WTO memegang prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dimana dalam melakukan perdagangan internasional harus dilakukan tanpa diskriminasi. Namun terdapat pengecualian bagi negara-negara yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Dengan semakin tingginya tingkat interdepedensi antar negara, adanya liberalisasi perdagangan merupakan kabar baik dalam kegiatan perdagangan internasional. Berkurang/hilangnya hambatan tariff dan non tariff mempermudah suatu negara untuk mengekspor maupun mengimpor barang, jasa, maupun investasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.

Mengikuti fenomena ini, semua negara-negara di dunia ikut andil dalam mendorong liberalisasi perdagangan dengan melakukan kerjasama perdagangan bebas baik secara bilateral maupun regional. Secara regional dapat dilakukan dalam skema *Free Trade Area* (FTA). Sedangkan secara bilateral dapat dilakukan dengan *Economic Partnership Agreement* (EPA).

EPA adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan.[[2]](#footnote-3) EPA merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang mulai didirikan pada tahun 2000 dan hingga kini Jepang telah melakukan kerjasama ini dengan delapan negara, yaitu Mexico, Chile, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Kerjasama Jepang dan Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2008.[[4]](#footnote-5) EPA Indonesia-Jepang adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO Plus (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*capacity building*) sebagai bagian dari Partnership agreement.[[5]](#footnote-6)

Terdapat berbagai barang yang masuk kedalam daftar penurunan/penghapusan tariff bea masuk bagi Jepang dan Indonesia dalam EPA Indonesia-Jepang. Bagi kedua negara ini, penururnan/penghapusan tariff bea masuk merupakan keuntungan yang besar karena kedua negara ini sudah menjadi mitra dagang yang cukup lama dan memiliki hubungan diplomasi yang baik. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang yang besar, begitupun sebaliknya.

Dalam kegiatan ekspor, Indonesia telah sering bergantung pada ekspor migas yang diekspor ke mitra dagang Indonesia, termasuk Jepang. Namun Indonesia juga masih memiliki produk lain yang dapat dijadikan unggulan dalam kegiatan ekspor Indonesia, seperti produk-produk non-migas yang terus mengalami kenaikan ekspor hingga mencapai surplus. Beberapa produk non-migas yag menjadi unggulan Indonesia untuk di ekspor adalah alaskaki, produk hasil hutan, kelapa sawit, kakao olahan dan biji kakao, kopi, karet dan produk karet, dan tekstil dan produk tekstil (TPT)[[6]](#footnote-7).

Sebagian besar produk unggulan ekpor Indonesia banyak yang di ekspor ke Jepang karena memang Jepang merupakan mitra dagang Indonesia yang besar selain China, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia. TPT memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Tercatat pada tahun 2006, TPT memberikan kontribusi sebesar 11,7 persen terhadap total ekspor nasional, 20,2 persen terhadap surplus perdagangan nasional, dan 3,8 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).[[7]](#footnote-8)

Industry tekstil Indonesia memiliki struktur industry yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Di tungkat hulu, terdapat industry serat dan industry pemintalan serta pencelupan (*spinning*). Lalu terdapat industry pertenunan, perajutan, pencelupan dan finishing. Pada tingkat hilir terdapat industry garmen.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai peluang dari kerjasama EPA Indonesia-Jepang terhadap perkembangan industry TPT di Indonesia yang tertuang dalam skripsi yang berjudul:

**“Economic Partnership Agreement Indonesia-Jepang dan Implikasinya terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia.”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha untuk menidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi EPA Indonesia-Jepang terhadap perdagangan antara Indonesia-Jepang?
2. Sejauhmana kebijakan Indonesia terhadap industry TPT dalam menghadapi EPA Indonesia-Jepang?
3. Bagaimana pengaruh EPA Indonesia-Jepang terhadap perkembangan industry TPT di Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan di atas maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menitikberatkan pada: perkembangan industry TPT Indonesia, khususnya perdagangan produk dari industry TPT Indonesia di Jepang.

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan menganalisa mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

**“Sejauhmana implementasi kebijakan dalam perkembangan industry TPT Indonesia khususnya perdagangan produk TPT Indonesia setelah berlakunya EPA Indonesia-Jepang?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mengetahui hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang dalam kerangka EPA antara Indonesia dan Jepang.
	2. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap industry TPT.
	3. Untuk mengetahui pengaruh EPA Indonesia-Jepang terhadap perkembangan industry TPT di Indonesia.
1. **Kegunaan Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menempuh ujian strata satu (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
2. Sebagai dedikasi peneliti dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional itu sendiri.
3. Sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa Hubungan Internasional maupun bagi semua mahasiswa yang berbeda jurusan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai ekspor tekstil Indonesia dalam skema kerjasama EPA Indonesia-Jepang.
4. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berminat meneliti masalah hubungan internasional khususnya mengenai ekspor tekstil Indonesia ke Jepang dalam skema kerjasama EPA Indonesia-Jepang.
5. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
6. **Kerangka Teoritis**

Sebagai penunjang dari penelitian ini, maka penulis akan memaparkan teori-teori para ahli yang berhubungan dengan tema, judul dan masalah yang dibahas dalam tulisan dan objek penelitian ini. Teori-teori ini dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi penulis dalam menulis penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan merupakan teori-teori yang berkait dengan permasalahan dalam Hubungan Internasional.

Kajian mengenai hubungan internasional muncul pasca Perang Dunia I pada tahun 1920-an dan menjadi bidang studi yang berdiri sendiri di Amerika dan Eropa.[[9]](#footnote-10) Hubungan internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik high politics. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain memfokuskan pada kajian hubungan politik antar negara yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga mencangkup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh actor-aktor bukan negara (non-state).[[10]](#footnote-11)

Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar nengeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdaganan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.[[11]](#footnote-12)

Pengertian dari hubungan internasional menurut **Banyu Perwita** dalam bukunya “Pengantar Hubungan Internasional” sebagai berikut:

**“Hubungan Interasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa actor yang berpartisipasi dalam politik internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.”[[12]](#footnote-13)**

Kajian dalam hubungan internasional pasca Perang Dingin semakin meluas, bukan hanya kajian mengenai hubungan antar negara saja, namun muncul kajian baru pada bidang hukum internasional, politik internasional, ekonomi internasional dan organisasi internasional. Selain itu juga muncul isu-isu lain yang menjadi kajian dalam hubungan internasional seperti isu Hak Asasi Manusia (HAM), isu lingkungan serta isu gender.

Dalam melakukan hubungan internasional terdapat beberapa interaksi antar negara-negara, interaksi tersebut dapat berbentuk perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional[[13]](#footnote-14). Pasca Perang Dingin, hubungan antar negara lebih erat dengan banyaknya negara yang melakukan hubungan internasional melalui kerjasama internasional.

Menurut **K. J. Holsti**, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut[[14]](#footnote-15):

1. **Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.**
2. **Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.**
3. **Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.**
4. **Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.**
5. **Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.**

Selain itu, mengenai kerjasama internasional **Koesnadi Kartasasmita** menyatakan bahwa “Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional.”[[15]](#footnote-16)

Kerjasama merupakan salah satu dari interaksi antar aktor hubungan internasional dimana didalamnya terdapat kepentingan setiap negara. EPA Indonesia-Jepang merupakan interaksi antara aktor hubungan internasional yang berbentuk kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang. EPA Indonesia-Jepang sebagai kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang merupakan akibat dari hubungan interdependensi antara kedua negara tersebut. Kedua negara yang saling bergantung itu sepakat untuk melakukan kerjasama. Kerjasama itu dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing negara, karena hubungan interdependensi antara negara merupakan ketergantungan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara.

Setiap negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, sehingga mereka perlu melakukan hubungan internasional dengan melakukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.

Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral.[[16]](#footnote-17) Kerjasama internasional terbagi atas dua bentuk, antara lain[[17]](#footnote-18):

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*)
2. Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*), kerjasama ini biasanya kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan social-budaya

Selain bentuk-bentuk di atas, kerjasama internasional juga dibagi dalam bentuk kerjasama secara bilateral, multilateral dan regional.

Kerjasama antara Indonesia dan Jepang termasuk kedalam kerjasama bilateral karena dilakukan oleh dua negara. Serta kerjasama EPA Indonesia-Jepang termasuk kedalam kerjasama fungsional, yaitu kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan bidang ekonomi antara kedua negara tersebut.

Kerjasama ekonomi antara dua negara termasuk kedalam studi Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam system internasional.[[18]](#footnote-19)

Dalam bukunya Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan, **Mochtar Mas’oed** mendefinisikan Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut:

**“…tentang saling-kaitan dan interaksi antara fonemena politik dengan ekonomi, antar “negara” dan “pasar”, antar lingkungan domestic dengan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat… ekonomi didefinisikan sebagai system produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpinan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi social dan ekonomi.”[[19]](#footnote-20)**

Adapun tujuan dari ekonomi internasional seperti yang dijelaskan oleh **R.E.A Ma’oer** dalam bukunya yang berjudul Ekonomi internasional, bahwa tujuan ekonomi internasional adalah sebagai berikut:

**“Tujuan dari ekonomi internasional adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan dari ekonomi internasional merupakan kerjasama membantu antar negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, akan dipenuhi.”[[20]](#footnote-21)**

Salah satu sub kajian yang termasuk dalam lingkup ekonomi-politik internasional, yaitu politik bisnis internasional. Menurut **Bob Sugeng Hadiwinata**dalam bukunya Politik Bisnis Internasional, mengatakan:

**“Politik bisnis internasional merupakan sub kajian yang membahas fenomena bisnis internasional dari kacamata politik. Telah banyak publikasi yang membahas bisnis internasional, tetapi belum banyak yang mencoba menjelaskannya dari kacamata politik, dimana factor *power* (kekuasaan) dan *structure* (struktur) dianggap sebagai factor-faktor penting uang mempengaruhi perilaku aktor-aktor negara dan non-negara (seperti kelompok bisnis, lembaga keuangan internasional, rezim internasional, dll) dalam melakukan transaksi bisnis antarbangsa dan antarwilayah.”[[21]](#footnote-22)**

Politik bisnis internasional merupakan kajian dalam HI mengenai transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang merupakan aktor non-negara. Industry TPT termasuk kedalam kajian politik bisnis internasional karena pelaku dalam industry tersebut merupakan non-negara.

Menurut **Apridar** dalam bukunya Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya menjelaskan definisi Perdagangan Internasional sebagai berikut:

**“Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.”[[22]](#footnote-23)**

Salah satu teori yang mempengaruhi perspektif ini merupakan teori “keunggulan komparatif” milik David Richardo. Dalam teori itu, Richardo berpendapat bahwa “perdagangan bebas akan membawa keuntungan bagi semua partisipan sebab perdagangan bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan, dengan demikian, meningkatkan produktivitas.”[[23]](#footnote-24)

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam kerangka EPA Indonesia-Jepang merupakan kerjasama perdagangan bebas secara bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang. EPA Indonesia-Jepang adalah Free Trade New-Age yang mencangkup liberalisasi didalamnya.

Definisi dari perdagangan bebas menurut **Dominic Salvator** dalam bukunya Ekonomi Internasional Jilid 1 adalah sebagai berikut:

**“perdagangan bebas adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan tariff dan nontariff di antara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing anggota negara tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan perdagangan yang diharapkan terhadap negara-negara luar atau bukan anggota.”[[24]](#footnote-25)**

Tujuan dari perdagangan bebas adalah untuk mengurangi hingga menghilangkan hambatan-hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional. Bentuk hambatan-hambatan tersebut antara lain[[25]](#footnote-26):

* 1. Tariff atau bea cukai.
	2. Kuota.
	3. Subsidi.
	4. Muatan local.
	5. Peraturan administrasi.
	6. Peraturan antidumping.

Dalam perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Jepang, kedua negara sepakat untuk menurunkan tariff dari bea masuk barang. Definisi dari tariff adalah “pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara.”[[26]](#footnote-27)

Tariff digolongkan menjadi tiga, antara lain[[27]](#footnote-28):

* + 1. Bea Ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain.
		2. Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
		3. Bea Impor (*Import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam *custom area* suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan terakhir.

Dalam kerjasama EPA Indonesia-Jepang terdapat kegiatan ekspor dan impor, maka definisi dari keduanya sebagai berikut:

**“Ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku…. Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing.”[[28]](#footnote-29)**

Berdasarkan data dan teori diatas, dapat ditarik beberapa asumsi yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan dikaji penulis adalah sebagai berikut:

1. Munculnya WTO yang memiliki tujuan liberalisasi pasar di dunia membuat banyak bermunculan kerjasama-kerjasama perdagangan bebas antar negara sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian tujuan WTO.
2. Indonesia dan Jepang yang juga anggota WTO ikut berkontribusi dengan menyepakati *Economic Partnership Agreement* Indonesia-Jepang.
3. Dengan disepakatinya perjanjian bilateral tersebut diharapkan hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang semakin erat serta adanya peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia ke Jepang, salah satunya produk TPT Indonesia.
4. Selain peningkatan ekspor, diharapkan terdapat bantuan lain dari Jepang untuk meningkatkan perkembangan industry TPT Indonesia.
5. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika setelah diberlakukannya EPA Indonesia-Jepang program-program dalam kesepakatan tersebut seperti investasi serta *capacity building* melalui program MIDEC berjalan, maka industry TPT di Indonesia dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga mengalami peningkatan ekspor barang ke luar negeri, khususnya Jepang.”**

1. **Table Operasional Variabel**

**Tabel 1**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Jika setelah diberlakukannya EPA Indonesia-Jepang program-program dalam kesepakatan tersebut seperti investasi serta *capacity building* melalui program MIDEC berjalan. | 1. Investasi.
2. Program MIDEC
 | 1. Data dari sumber menyatakan adanya investasi dari Jepang pada industry TPT di Indonesia pada tahun 2010-2014 sebesar US$ 481 juta.

(<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=66013-2010-2014,-Realisasi-Investasi-Jepang-US$12,1-Milliar>)1. Data dari sumber menyatakan adanya bantuan *capacity building* yang dilakukan pada program MIDEC bagi industry-industri di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 2009 melalui kegiatan *dispatch mission*,antara lain seminar atau workshop, kunjungan kerja ke perusahaan besar di Jepang serta mendatangkan expert dari Jepang.

(http://www.kemenperin.go.id/download/3278/Laporan-Studi-2009---Pengaruh-Implementasi-MIDEC-terhadap-Penguatan-Struktur-Industri) |
| Variabel Terikat:Industry TPT di Indonesia akan mengalami peningkatan ekspor barang ke luar negeri, khususnya Jepang. | 1. Peningkatan produktivitas
2. Ekspor produk.
 | 1. Data dari sumber menyatakan adanya peningkatan produktivitas setelah dilakukan restrukturisasi mesin sekitar 7-17%.

(http://www.kemenperin.go.id/artikel/66/Program-Restrukrisasi-Permesinan-Industri-TPT-Diperluas)1. Data dari sumber menyatakan adanya peningkatan ekspor tekstil Indonesia ke Jepang dimana pada tahun 2008 ekspor produk TPT Indonesia sebesar US$ 547 juta, dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 ekspor produk TPT Indonesia ke Jepang sebesar US$ 1.069,4 juta.

(Badan Pusat Statistik) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

JEPANG

INDONESIA

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

KEPENTINGAN NASIONAL JEPANG

KERJASAMA INTERNASIONAL

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

PROGRAM MIDEC

PENURUNAN TARIF BEA MASUK

INVESTASI

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI TPT DI INDONESIA

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingat Analisis**

Analisis induksionis, yaitu unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi dari unit analisanya.

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Metode penelitian deksriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penulis menggambarkan bahwa dalam penerapan metode ini tidak terbatas pada pengumpulan data, namun meliputi analisis dan interpretasi tentnag arti data tersebut

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*liberary research)*, yaitu membahas keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topic penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan topic yang akan dibahas penalaahan data tersebut bisa didapat dari buku teks, jurnal ilmuah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, artikel-arikel, majalah-majalah, surat kabar, bulletin-buletin maupun dari website/internet yang ada hubungannya dengan topic yang diangkat.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, penulis mendatangi lokasi-lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Dalam II No. 17D, Bandung

1. Kementerian Perdagangan Indonesia

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat (10110)

Telepon (021) 3841961/62

1. Kementerian Luar Negeri Indonesia

Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat (10110)

Telepon (021) 3441508

1. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Adhigraha Bldg. 16 th fl.

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 56 Jakarta 12950

Phone : 021 5272171

Fax : 021 5272166

1. Jurnal Media Cetak
2. Media Internet
3. **Lamanya Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yang dimulai dari persiapan judul pembuatan proposal penelitian, pencarian data dan pengolahan data.

**Tabel 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **2015** |
| **Januari** | **Februari** | **Maret** | **April** | **Mei** | **Juni** | **Juli** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Tahap Persiapan** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Konsultasi judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Pengajuan Judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c. Pengajuan dan revisi proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Seminar proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e. Perbaikan hasil seminar proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Tahap Penelitian** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Pengurusan surat izin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Kepustakaan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Pengolahan data** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Analisis data** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **Kegiatan akhir** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Penyusunan draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Seminar draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c. Perbaikan hasil seminar draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Persiapan dan sidang skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Jadwal Penelitian**

1. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis tentang masalah yang penulis teliti.

BAB II KERJASAMA EPA INDONESIA-JEPANG

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pembentukan kerjasma EPA INDONESIA-JEPANG

BAB III PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang sedikit sejarah mengenai industry TPT Indonesia, perkembangan industry TPT tekstil Indonesia.

BAB IV KERJASAMA EPA INDONESIA-JEPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKSPOR TEKSTIL INDONESIA KE JEPANG

Bab ini akan membahas mengenai implikasi dari EPA INDONESIA-JEPANG terdahap ekspor tekstil Indonesia ke Jepang

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang di ambil

1. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 266. [↑](#footnote-ref-2)
2. JETRO, “Bagaimana Menikmati Preferensi Tarif Melalui EPA/FTA”, dalam http://www.jetro.go.jp/indonesia/jiepa/index.html/BrosurEPAind2009.pdf, diakses 9 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-3)
3. Widiana Puspitasari, “Peranan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) dalam Mengatasi Krisis Listrik di Sumatera Utara (studi kasus: proyek pembangkit listrik panas bumi (PLTPB) sarulla di sumatera Utara)”, dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/394/jbptunikompp-gdl-widianapus-19694-9-11.babi-i.pdf, diakses 9 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-4)
4. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, dalam <http://www.tarif.depkeu.go.id/Tarif/Eng/ijepa/?menu=catatan>, diakses 9 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-5)
5. Widiana Puspitasari, *Op, Cit.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Utama, <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-main-commodities>, diakses tanggal 17 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ermina Miranti, “Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: Antara Potensi dan Peluang”, dalam http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/626/jbptitbpp-gdl-erminamira-31285-1-tekstil.pdf, diakses pada 17 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: DIsiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES: 1990), hlm 14. [↑](#footnote-ref-10)
10. T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987), hlm 26-27. [↑](#footnote-ref-12)
12. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 4. [↑](#footnote-ref-13)
13. Mochtar Mas’oed, *Op. Cit*, hlm 32. [↑](#footnote-ref-14)
14. K.J Holsti, *Politik Internasional, Kernagka Untuk Analisis,* Jilid II, (Terjemahan M. Tahrir Azhari) (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm 652-653. [↑](#footnote-ref-15)
15. Koesnadi Kartasismita, *Organisasi dan Administrasi Internasional* (Bandung, Fisip UNPAD Press, 1983), hlm 83. [↑](#footnote-ref-16)
16. James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltz Graff Jr., *Contending Theories of International Relation: A Comphensive Survey* (New York: Longman, 1986), hlm 419 [↑](#footnote-ref-17)
17. T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm 7-8. [↑](#footnote-ref-18)
18. Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, *Op. Cit*, hlm 75. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mochtar Mas’oed, *Ekonomi-Politik internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 4. [↑](#footnote-ref-20)
20. R.E.A Ma’moer, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1974), hlm 1. [↑](#footnote-ref-21)
21. Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (YogyakartaL Penerbit Kanisius, 2006), hlm 27. [↑](#footnote-ref-22)
22. Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 169. [↑](#footnote-ref-23)
23. Robert Jackson dan Georg Soransen, *Op. Cit*, hlm 235. [↑](#footnote-ref-24)
24. Dominick Salvatore, *International Economics*, (New Jersey: Prentice Hall- Gale, 1997), 321. [↑](#footnote-ref-25)
25. Apridar, *Op. Cit* hlm 122. [↑](#footnote-ref-26)
26. Nopirin, *Ekonomi Internasional*  (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm 51. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid,* hlm 51-52. [↑](#footnote-ref-28)
28. Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawti, *Dasar-dasar Ekspor Impor: Teori, Praktik, dan Prosedur* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm 12-13. [↑](#footnote-ref-29)